

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap perencanaan pembangunan mempunyai maksud untuk mengembangkan kualitas kehidupan penduduk secara sistematis dan terencana. Berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”. Dalam peraturan diatas menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki tujuan menciptakan pembangunan daerah guna meningkatkan serta meratakan pendapatan masyarakat, lapangan usaha, kesempatan kerja, serta meningkatkan keunggulan bersaing dan nilai lebih suatu daerah.

Hidayat (2017, p. 2) menyatakan bahwa setiap negara memiliki permasalahan dalam menghadapi kebijakan awal suatu pembangunan ekonomi. Namun selain berupaya mencapai target pembangunan, juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan secara merata yang berasal dari hasil pembangunan ekonomi. Karena tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan antar daerah adalah dengan menciptakan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang

adil dan merata. Kesejahteraan ini adalah suatu keadaan dimana masyarakat dalam keadaan yang makmur (Kemenkeu Jawa Timur, 2020).

Salah satu permasalahan pembangunan dalam lingkup pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah disparitas pendapatan. Hal tersebut terjadi karena selisih laju pertumbuhan pendapatan daerah yang lumayan meluas antar wilayah saat proses awal pembangunan ekonomi nasional yang menyebabkan disparitas dalam distribusi pendapatan (Aminah, 2017). Selain itu, disparitas pendapatan juga termasuk dalam disparitas ekonomi, dimana pada situasi yang sudah terjadi disparitas antara persentase total penduduk dengan persentase sumber daya alam termasuk pendapatan yang didapat oleh penduduk setempat (Prastowo et al., 2014, p. 130).

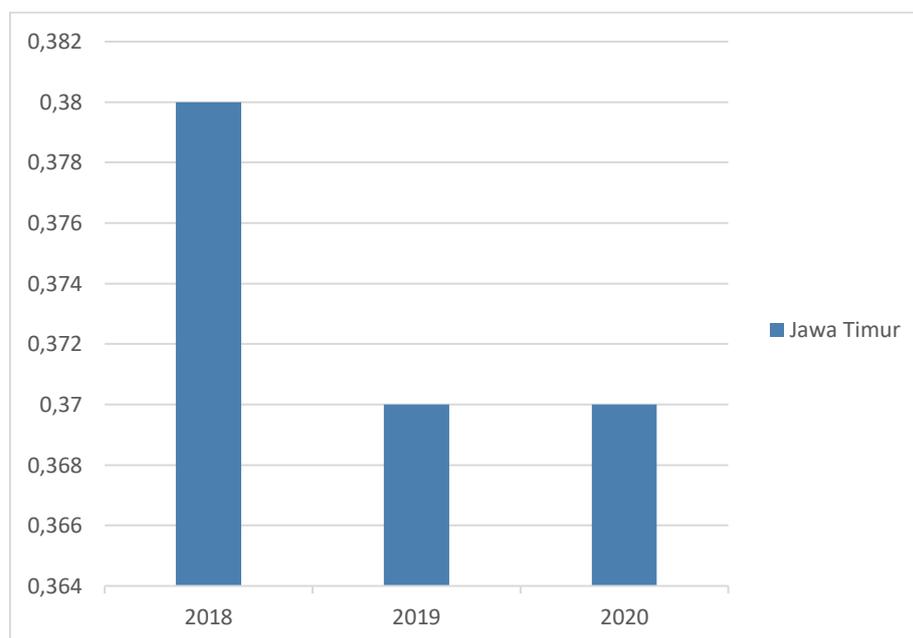
Aminah (2017) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah pada mulanya ditunjukkan pada kenaikan, ekspansi dan perbaikan dari tahun terdahulu, yang bermaksud untuk menaikkan taraf hidup dan menekan pemerataan hingga memperluas peluang pekerjaan dan peluang berusaha, maka dari itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial warga. Menurut Prastowo et al. (2014, p. 132) menjelaskan bahwa penyebab timbulnya disparitas pendapatan diantaranya: (1) terdapat penguasaan sumber daya alam atau distribusi yang tidak adil; (2) terjadinya perbedaan perilaku antar penduduk golongan bawah dan penduduk golongan atas; (3) adanya pemaksaan sosial pada penduduk untuk bekerja atau tidak dibolehkan bekerja dalam berbagai bidang pekerjaan; (4) terjadinya kebijakan publik (pendidikan, angkatan kerja, kesehatan dan lain-lain) yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas distribusi sumber daya alam yang tersedia.

Sayifullah (2021) mengatakan, bahwa Indonesia pada tahun 2016 memiliki masalah kesenjangan kekayaan antara penduduk miskin dan penduduk kaya, bahkan Indonesia memasuki peringkat keempat, dimana 1 persen penduduk kaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Negara dengan peringkat diatas Indonesia yang mengalami permasalahan kesenjangan kekayaan antara penduduk miskin dan penduduk kaya yaitu Rusia (74,5 persen), India (58,4 persen), dan Thailand (58 persen). Maka dari itu disparitas pendapatan di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius dalam perekonomian, sehingga perlu dilakukannya strategi dan kebijakan yang sesuai agar kekayaan nasional dapat didistribusikan dengan adil dan merata. Permasalahan disparitas pada distribusi pendapatan ini bisa di timbulkan oleh beberapa variabel. Seperti situasi masing-masing daerah yang mempunyai karakteristik, potensi, dan tipologi yang beragam (Aminah, 2017).

Indonesia ialah negara yang luas, terdiri dari aneka pulau mulai dari sabang hingga marauke. Memiliki aneka budaya serta suku yang berbeda antar daerah, mulai dari sumber daya alam, perekonomian, letak geografis, sumber daya manusia, sosial, dan budaya. Hal ini akan mempengaruhi pada perkembangan suatu daerah, ada yang tumbuh lebih cepat dan sebaliknya daerah yang tertinggal. Oleh karena itu, dapat menyebabkan disparitas pendapatan antar wilayah (Zahara, 2017). Fenomena disparitas pendapatan ini hampir terjadi diseluruh penjuru di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas sebesar 36,75 persen dari luas total pulau jawa. Serta mempunyai 29 kabupaten dan 9 kota, dengan jumlah penduduk

sebesar 40,666 juta jiwa. Dengan total penduduk yang sangat besar tersebut Jawa Timur memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk perkembangan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur (BPS Jatim, 2021).

**Gambar 1.1. Rasio Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020**



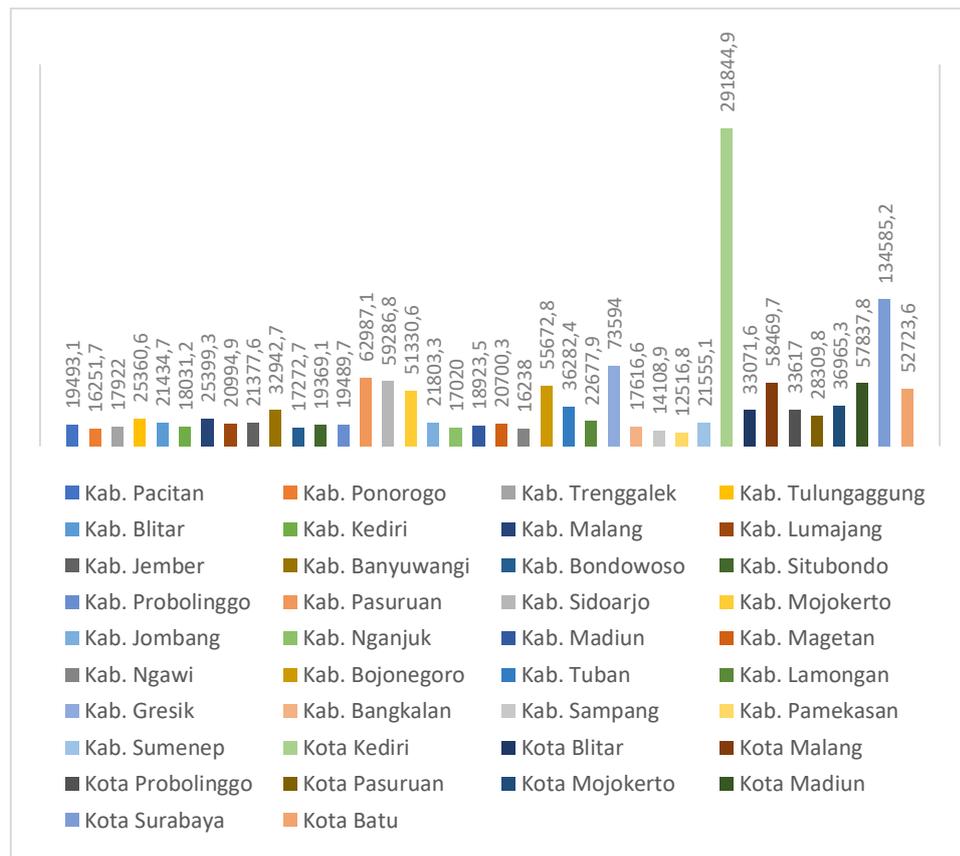
Sumber : BPS Jatim, 2020 (*diolah*)

Sesuai Gambar 1.1 bisa dijelaskan bahwasanya rasio gini Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2019-2020 Provinsi Jawa Timur memiliki rasio gini yang stabil. Meskipun mengalami penurunan, hal ini belum terbukti bahwa disparitas pendapatan antar daerah rendah atau sudah meratanya suatu pendapatan.

Menurut Todaro dalam (Wulandari & Sakti, 2020) pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pertumbuhan yang pesat ini tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata, terjadinya disparitas pendapatan yang semakin tinggi ini menjadi permasalahan pembangunan. Oleh sebab itu perlunya tindakan untuk

memilimalkan permasalahan tersebut serta mendorong pemerintah agar fokus pada pembangunan ekonomi kedepannya. Selain itu (Nuraini, 2017) berpendapat bahwasanya pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi disparitas pendapatan.

**Gambar 1.2. PDRB Per Kapita ADHK 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 (Ribu Rupiah)**



Sumber : BPS Jatim, 2020 (*diolah*)

Sesuai Gambar 1.2 bisa dijelaskan bahwasanya kabupaten/kota yang mempunyai tingkat PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Kediri (291.844,9), Kota Surabaya (134.585,2), dan Kabupaten Pasuruan (62.987,1). Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Pamekasan (12.516,8), Kabupaten Sampang (14.108,9), dan Kabupaten Ngawi (16.238,0). Namun berbeda dengan rasio gini pada Gambar

1.2 yang mengalami penurunan di tahun 2019-2020. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbedaan situasi antar daerah terjadi cukup signifikan, Jika dilihat perbedaan antara PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Kediri sebesar 291.844,9 dan PDRB per kapita terendah sebesar Kabupaten Pamekasan sebesar 12.516,8. Maka memiliki perbedaan selisih sebesar 279.328,1. Hal ini cukup menunjukkan bahwa masih besarnya tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Menurut (Suhendra et al., 2021, p. 4) mengatakan bahwa munculnya perbedaan pada pendapatan, dikarenakan terdapat selisih sumber daya yang dimiliki serta faktor produksi yaitu barang modal yang tersedia. Karena mereka yang mempunyai faktor produk yang tinggi, secara tidak langsung akan memperoleh pendapatan yang tinggi juga. Berdasarkan teori neoklasik, perbedaan tersebut dapat dikurangi dengan melewati metode munculnya hasil pembangunan ke dataran dan selanjutnya menyebar sehingga menyebabkan keseimbangan baru.

(Prastowo et al., 2014, p. 132) mengemukakan berdasarkan ahli statistik bernama Simon Kuznets yang terkenal dengan teorinya yaitu Kurva U terbalik. Menyatakan bahwa tahapan awal dalam pembangunan sering ditandai dengan terjadinya ketimpangan yang terus meningkat, tetapi seiring berjalannya pembangunan, ketimpangan pada tingkat tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh redistribusi pendapatan dan pendidikan yang meningkat.

Tingkat pendidikan bisa menjadi faktor dalam menurunkan atau meningkatkan disparitas pendapatan (Nuraini, 2017). Karena tingkat

pendidikan dalam masyarakat menggambarkan susunan kesejahteraan kelompok di daerah tertentu. Pendidikan merupakan suatu keharusan yang dapat menjadi pegangan pada kemajuan bangsa (BPS Jatim, 2019). Menurut Todaro dalam (Nuraini, 2017) menyatakan bahwa salah satu bekal untuk menyerap teknologi dan membentuk kemampuan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah sektor pendidikan. Teori Kuznet dalam (Nuraini, 2017) juga menambahkan bahwa tingkat pendidikan berhubungan dengan distribusi pendapatan. Seperti masyarakat kelas bawah yang berpendapatan rendah, cenderung tidak mendapatkan distribusi pendapatan merata, disebabkan faktor pendidikan yang rendah.

**Tabel 1.1. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Sederajat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020 (Persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar</b>
<b>2018</b>	79,11 %
<b>2019</b>	84,80 %
<b>2020</b>	86,24 %

Sumber : BPS Jatim, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jawa Timur menghadapi peningkatan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2018 yaitu sebesar 79,11 persen, 2019 sebesar 84,80 persen, dan 2020 sebesar 86,24 persen. Keadaan ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sekolah pada jenjang Sekolah Menengah (SM). Selain itu penduduk dengan usia diatas 15 tahun dengan pendidikan minimal SM yang berarti sedang berada pada usia kerja

produktif (Nuraini, 2017). Karena di masa yang akan datang pekerjaan menjadi semakin sulit dan mensyaratkan bahwa teknologi yang didapat dari bersekolah tinggi (BPS Jatim, 2021). Selain itu, daerah perkotaan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dari pada daerah perdesaan. Situasi ini disebabkan keberadaan fasilitas pendidikan yang lebih banyak terletak di daerah perkotaan (BPS Jatim, 2019).

Pembangunan ekonomi suatu daerah juga dapat diamati dari indikator ketenagakerjaan, hal ini dapat memperlihatkan potensi, ataupun permasalahan-permasalahan, kemudian dapat dibuat dasar kebijakan dan antisipasi terjadinya hambatan dalam menuju tujuan pembangunan (BPS Jatim, 2021). Menurut Sukino dalam (Wulandari & Sakti, 2020) mengatakan angkatan kerja terdiri dari dua jenis yaitu bekerja dan pengangguran. Sedangkan (Majid, 2021, p. 129) menjelaskan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

**Tabel 1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020 (Persen)**

<b>Tahun</b>	<b>TPAK</b>
<b>2018</b>	69,56 %
<b>2019</b>	69,61 %
<b>2020</b>	70,33 %

Sumber : BPS Jatim 2020

Dari Tabel 1.2 diatas, menjelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2018 sebesar 69,56 persen, tahun 2019 sebesar 69,61 persen, dan tahun 2020

sebesar 70,33 persen. Artinya, jumlah penduduk di Jawa Timur akan terus meningkat dari tahun terdahulu hingga sekarang dan menyebabkan jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Menurut teori Neoklasik dalam (Wulandari & Sakti, 2020) mengatakan jika tenaga kerja yang kurang maju melakukan perpindahan ke wilayah yang lebih maju dan mendapatkan upah yang lebih besar, maka akan menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin meluas. Hal ini menarik peneliti untuk melihat sebesar apa pengaruh angkatan kerja terhadap disparitas pendapatan.

Teori Kuznet dalam (Arifin & Sari, 2020, p. 41–42) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi kontroversial hingga saat ini. Selain itu, literatur baru tidak hanya menelusuri Kurva-U terbalik, namun mulai dari kebijakan fiskal, belanja negara, dan perpajakan.

Menurut (Prastowo et al., 2014, p. 129) pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang pada awalnya menjadi instrumen distribusi ekonomi yang adil dan merata. Sehingga pada kenyataannya, pajak menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya ketimpangan. Pajak penghasilan didapatkan secara progresif sehingga penduduk berpendapatan tinggi (*high income*) membayar pajak lebih tinggi dibandingkan penduduk berpendapatan rendah (*low income*). Ketimpangan ini terjadi karena penduduk pendapatan tinggi belum patuh dalam membayar wajib pajak (Fahmi, 2019). Berikut merupakan perkembangan rasio penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2020.

**Tabel 1. 3 Tax Ratio di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2020 (persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Tax Ratio</b>
<b>2017</b>	9,68 %
<b>2018</b>	9,63 %
<b>2019</b>	9,41 %
<b>2020</b>	8,95 %

Sumber : Kemenkeu Jatim, 2020 (*diolah*)

Dari Tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwasanya pajak rasio (*tax ratio*) di Provinsi Jawa Timur dalam empat tahun terakhir terjadi penyusutan. Namun, saat tahun 2020 pajak rasio mengalami penurunan paling rendah menjadi 8,95 persen. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menekan pemerintah untuk mengambil keputusan pada sektor pajak (Kemenkeu Jatim, 2021).

Pajak merupakan salah satu sumber kesenjangan karena prinsip-prinsip keadilan dalam perpajakan tidak dapat berjalan. Sebab adanya diberbagai golongan penduduk seperti penduduk kaya dan penduduk miskin. Selain itu, masyarakat golongan kaya juga melakukan kecurangan secara legal atau illegal untuk mengurangi tanggungan pajak yang dimiliki, hal ini yang menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan pada masyarakat (Prastowo et al., 2014, p. 144).

Berdasarkan permasalahan diatas, menjadikan suatu dorongan kepada penulis untuk melakukan penelitian tersebut. Dengan perbedaan variabel dan lokasi penelitian dimana peneliti lain belum meneliti variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan kerja, perpajakan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian

dengan judul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja dan Perpajakan Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari identifikasi perkara yang muncul maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020?
2. Apakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020?
3. Apakah pengaruh angkatan kerja terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020?
4. Apakah pengaruh perpajakan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020.
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh angkatan kerja terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020.
4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh perpajakan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan dan Budaya Provinsi Jawa Timur periode 2010-2020. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan perpajakan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian adalah sebagai berikut:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan penelitian ini dapat meningkatkan pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan. Sehingga pemerintah dapat lebih fokus terhadap pembangunan ekonomi selanjutnya.